

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp1,5 T (97,7%)
▼-16,9% (yoy)

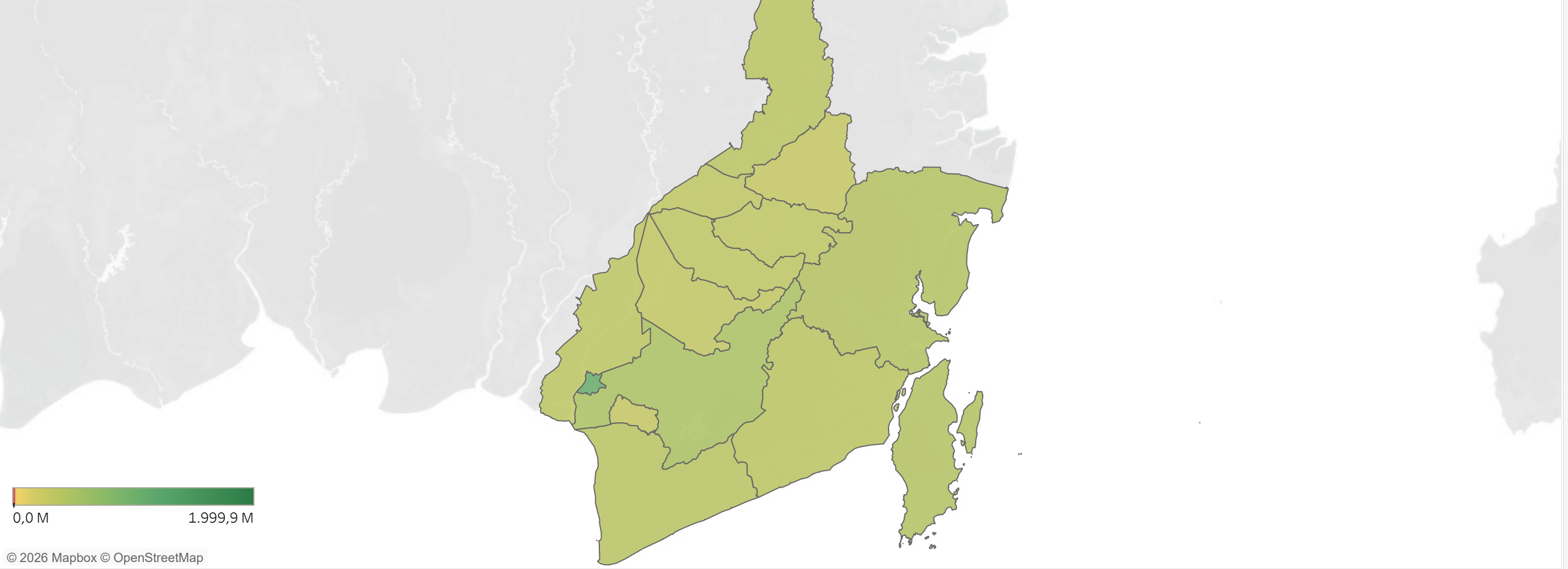
Belanja

Rp5,9 T (19,9%)
▼-30,5% (yoy)

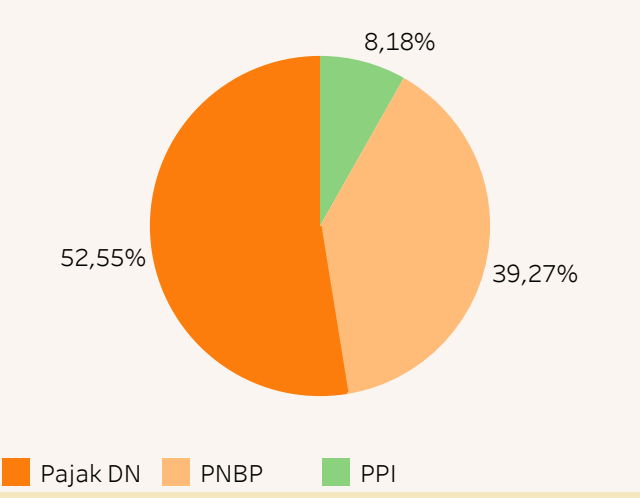
Defisit

Rp-4,4 T (15,6%)
▼34,2% (yoy)

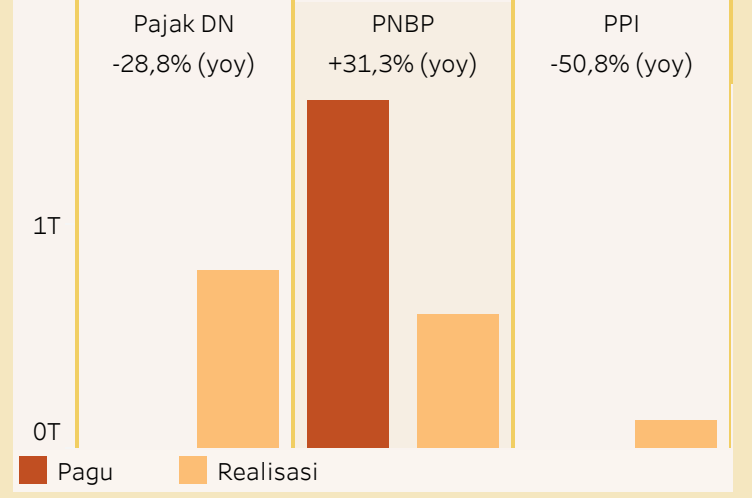
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



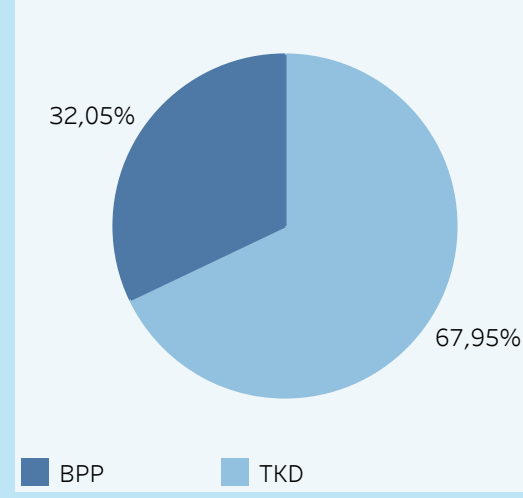
Persentase Komposisi Pendapatan



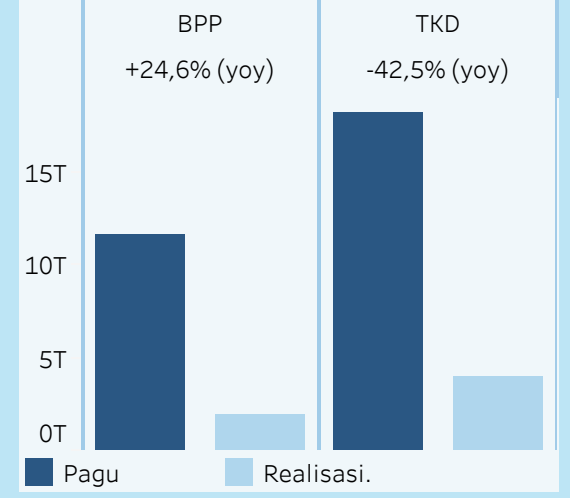
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



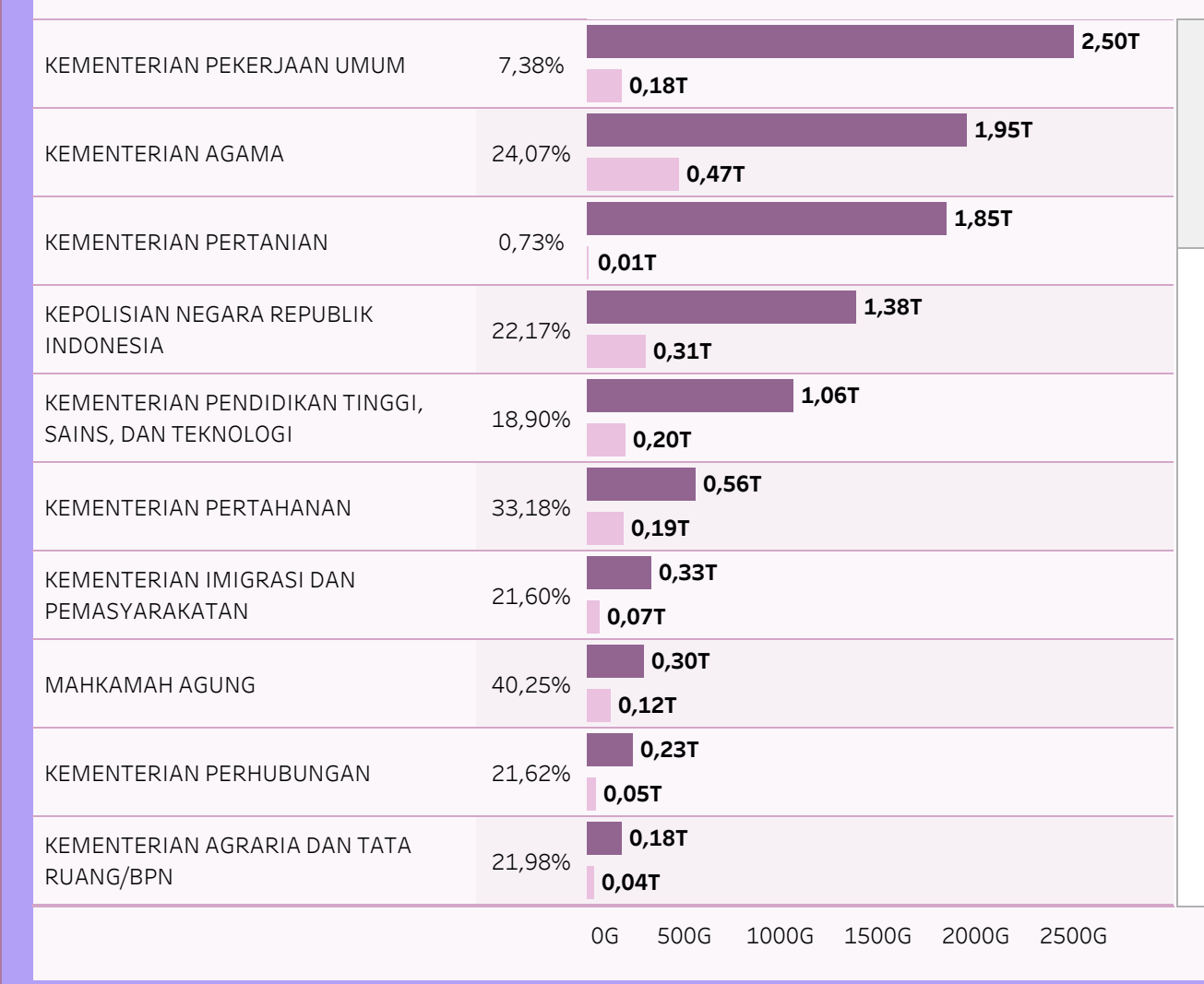
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	1,8T	1,5 T	▼16,87%
Grand Total	1,8T	1,5 T	▼16,87%

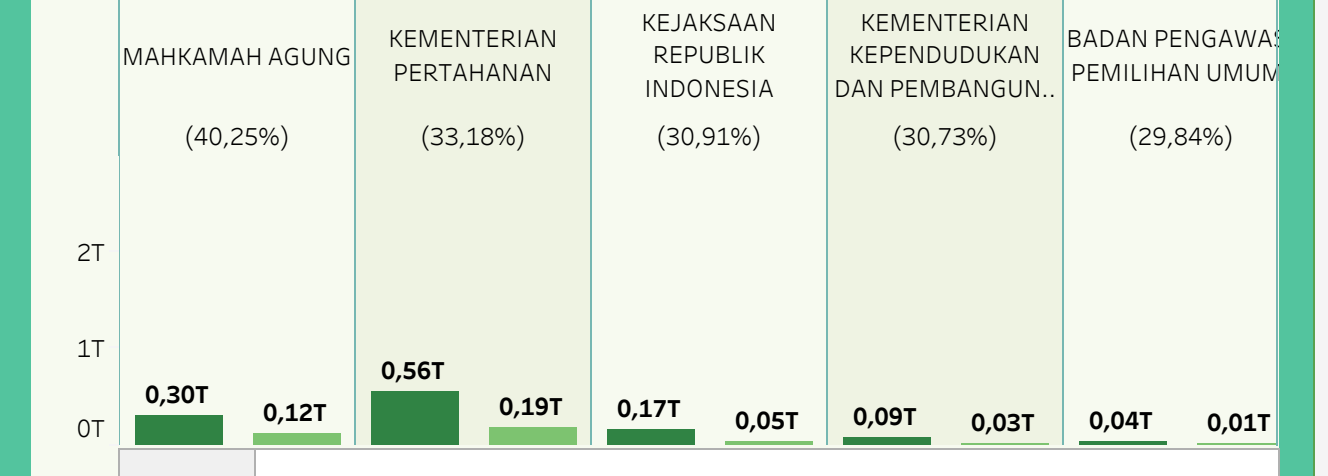
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	8,5T	20,4%	29,8T	5,9 T	19,9%	▼30,48%
Grand Total	41,8T	8,5T	20,4%	29,8T	5,9 T	19,9%	▼30,48%

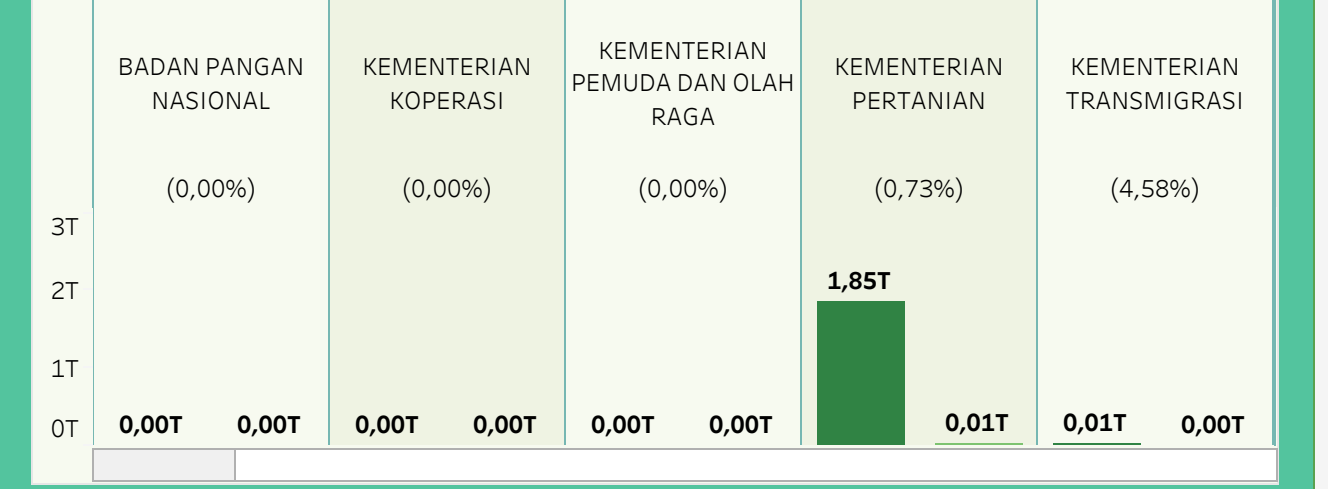
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



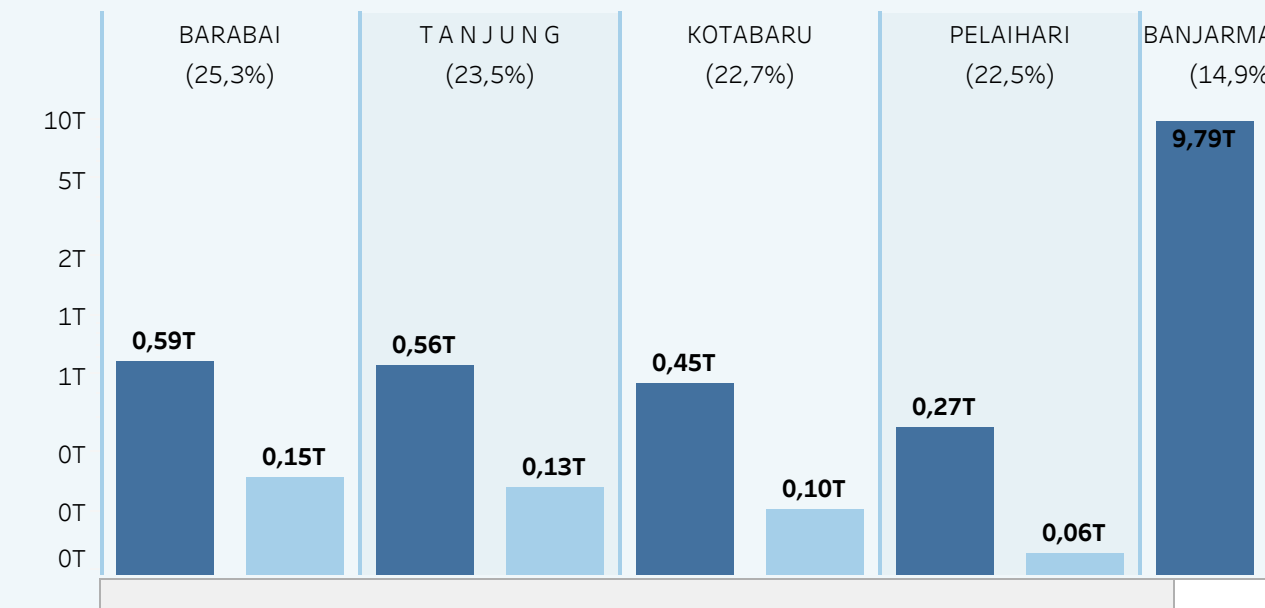
5 KL Persentase Realisasi Terendah



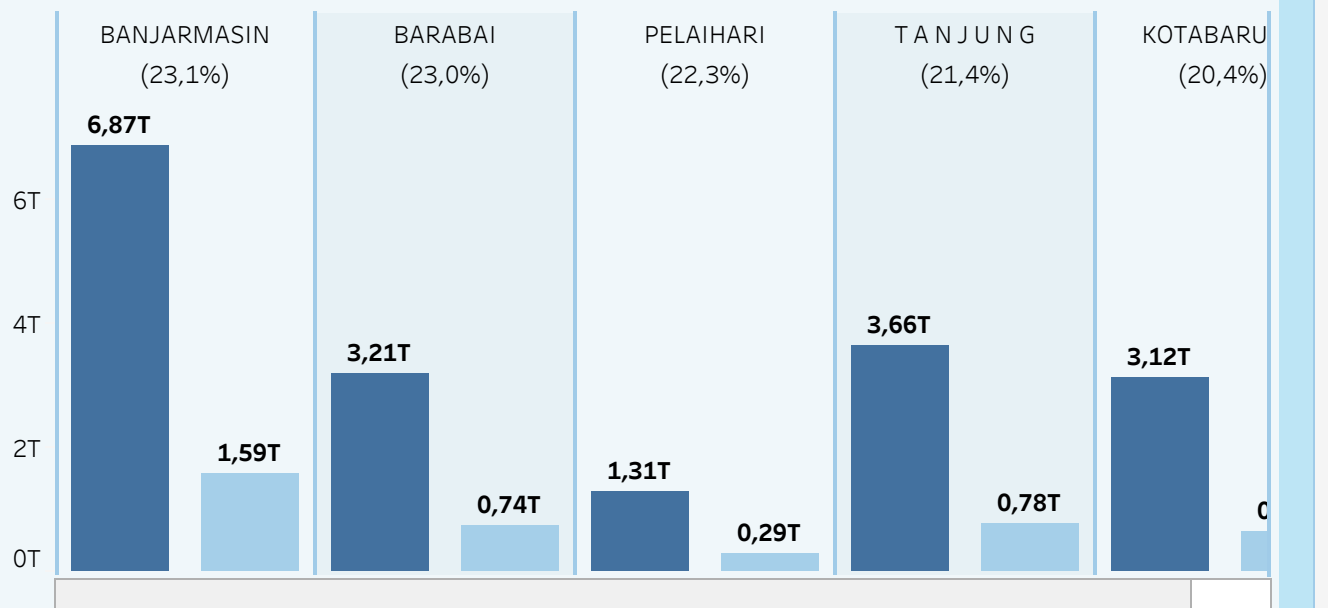
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 27 Maret 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp1.523,89 miliar (5,18%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,44 triliun. Realisasi tersebut terkontraksi sebesar 16,87% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 4,67% (Rp800,80 miliar), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 1,16% (Rp124,65 miliar), serta PNBPN mencapai 38,30% (Rp598,45 miliar). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (Rp800,80 miliar).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 27 Maret 2026

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp5,9 triliun (19,9%) dari pagu Rp29,8 triliun, terkontraksi 30,48% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 16,3% (Rp1,90 triliun) dari pagu Rp11,66 triliun, tumbuh 24,6% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 22,2% (Rp4,03 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, terkontraksi 42,5% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (67,95%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,50 triliun, dengan realisasi mencapai 7,38% (Rp0,18 triliun). Mahkamah Agung menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 40,25% (Rp0,12 triliun) dari pagu Rp0,30 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 0,73% (Rp0,01 triliun) dari pagu Rp1,85 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Mahkamah Agung dengan realisasi 40,25% (Rp0,12 triliun) dari pagu Rp0,30 triliun. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaranbelanja s.d. 13 Maret 2026 yaitu Badan Pangan Nasional, Kemenkop dan Kemenpora.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 23,4% (Rp0,89 triliun) dari pagu Rp3,79 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 18,3% (Rp3,04 triliun) dari pagu Rp16,66 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Penerapan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pengenaan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) menimbulkan kebingungan di kalangan karyawan karena metode perhitungan yang berbeda dari sistem

sebelumnya, sehingga pajak yang dipotong saat penerimaan THR sering dianggap lebih besar dan kurang transparan, meskipun secara keseluruhan tetap disesuaikan dalam perhitungan tahunan.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme TER secara sederhana dan transparan, termasuk menyediakan simulasi perhitungan yang mudah dipahami. Selain itu, perusahaan disarankan memberikan rincian pemotongan pajak secara jelas pada slip gaji/THR, sementara pemerintah dapat menyederhanakan pedoman teknis agar tidak menimbulkan multiinterpretasi di kalangan wajib pajak.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Anggaran untuk pemenuhan Prioritas Direktif Presiden di Kalimantan Selatan telah dialokasikan sebesar Rp16,75 M tersebar di lingkup satker-satker BPS sebesar Rp14,56 M, BPKP sebesar Rp0,75 M dan Kementerian Kehutanan sebesar Rp1,44 M. Realisasi anggaran pada KRO untuk Prioritas Direktif Presiden ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari eselon I sehingga dapat mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2026.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran agar memberikan kebijakan khusus terhadap satker yang telah melakukan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan prioritas Direktif Presiden sehingga tidak mempengaruhi kinerja capaian IKPA satker khususnya pada indikator penyerapan anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan prinsip *fairness treatment* dalam penilaian IKPA.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | Pergudangan dan Pusat Distribusi Banjarmasin

Sudah ada dokumen *feasibility study* dan IPRO. Kanwil DJPb melakukan koordinasi dengan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan site visit ke Pergudangan yang akan dilaksanakan pada tanggal Rabu, 20 Agustus 2025. Menunjukkan perkembangan positif melalui penyelesaian dokumen IPRO, pemetaan lokasi potensial di Kelurahan Basirih, serta promosi aktif kepada calon investor. Pemprov Kalimantan Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk penyesuaian tata ruang, serta mendorong percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur dasar guna memperkuat kesiapan proyek secara teknis dan administratif. Saat ini tanah masih milik masyarakat sehingga pembebasan lahan maupun pengurusan akan diserahkan kepada investor, sementara perkiraan pembiayaan dan rencana insentif fiskal juga belum disusun sehingga sepenuhnya akan dihitung oleh investor.

B | Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu

Sudah berhenti beroperasi sejak 2014 sampai sekarang, menunggu adanya investor baru dan sedang dalam penawaran ke investor asing. Telah memasuki tahap penjajakan lanjutan dengan investor, termasuk promosi proyek melalui portal nasional dan forum investasi strategis. Pemprov Kalimantan Selatan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi perizinan industri dan pertanahan, serta mendorong kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan industri. Upaya percepatan ini ditujukan untuk mendukung hilirisasi mineral dan peningkatan nilai tambah di sektor logam dasar. Sudah berhenti beroperasi sejak 2014 sampai sekarang dan telah diambil alih oleh BKPM

C | SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin

Sudah ada dokumen *feasibility study* dan IPRO dan siap ditawarkan, namun sejauh ini masih belum ada investor baru. Masih terus ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen IPRO dan studi kelayakan teknis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota terkait telah membentuk tim koordinasi lintas wilayah, menjajaki skema KPBU, serta melakukan promosi kepada investor potensial. Selain itu, percepatan perizinan dan penyiapan lahan untuk jaringan distribusi menjadi fokus utama dalam mendukung kesiapan implementasi proyek strategis ini.

D | Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru

Sudah ada dokumen *feasibility study* dan IPRO dan siap ditawarkan, namun sejauh ini masih belum ada investor baru. Telah mencakup finalisasi dokumen IPRO insinerator, identifikasi lokasi di kawasan TPA Provinsi, serta promosi aktif kepada calon investor melalui forum investasi daerah dan platform digital. Pemerintah juga mendorong percepatan izin lingkungan dan kerja sama antardaerah dalam penyediaan pasokan limbah medis, guna memastikan keberlanjutan operasional dan skala keekonomian proyek. Laporan APID terkait Limbah B3 telah disampaikan ke Dit. SMI.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemprov & Pemda)

1. Mempercepat kepastian lahan melalui skema pembebasan sebagian atau land banking untuk meningkatkan daya tarik investasi
2. Menyelesaikan RTRW/RDTR dan memastikan kesesuaian tata ruang pada seluruh proyek
3. Menyusun paket insentif daerah (keringanan pajak/retribusi, kemudahan perizinan) secara lebih konkret
4. Menjamin kesiapan infrastruktur dasar (jalan akses, air, listrik, dan konektivitas)
5. Memperkuat koordinasi lintas daerah untuk menjamin kepastian demand/suplai (misalnya SPAM dan limbah B3)

B | Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)

1. Mendorong percepatan perizinan terintegrasi melalui BKPM
2. Memberikan insentif fiskal bagi para investor yang mau menanamkan modal (*tax holiday/allowance*)
3. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis melalui Kementerian PUPR
4. Memperkuat kebijakan sektoral (hilirisasi, lingkungan, industri) oleh K/L teknis terkait
5. Menyediakan skema penjaminan proyek melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia khususnya untuk proyek KPBU

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG tidak ada perubahan yaitu 253, jumlah supplier tidak ada perubahan yaitu 833, dan penerima manfaat tidak ada perubahan yaitu 672.750 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Masih ditemukannya makanan yang tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kasarangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian mutu, pengawasan distribusi, serta standar operasional dalam penyediaan makanan pada program pemerintah, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Kepala SPPG agar segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan memperbaiki kualitas menu makanan dengan meningkatkan peran kepala *chef* dan ahli gizi, serta mempertimbangkan masukan dari penerima manfaat terkait menu makanan yang akan disajikan.

HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 1.584 menjadi 1.830 unit, realisasi FLPP meningkat dari 1.231 unit menjadi 1.470 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 320 lokasi menjadi 345 lokasi, jumlah Kab/Kota yang ada program FLPP 13 Kab/Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp161.749.835.250,- menjadi Rp193.101.275.250,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Terbatasnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Kalimantan Selatan, ditandai dengan tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dibandingkan kapasitas intervensi program pemerintah. Meskipun terdapat berbagai skema seperti perbaikan RTLH, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tantangan utama masih terletak pada keterbatasan anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta percepatan proses verifikasi dan distribusi bantuan.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Perlu dilakukan penguatan integrasi data sasaran melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan satu data perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) bersama Bappeda dan Dinas Sosial untuk meningkatkan ketepatan penerima bantuan, disertai digitalisasi proses verifikasi dan penyaluran oleh Disperkim agar lebih cepat dan transparan.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Program Prioritas dan Peluang Investasi Daerah
Minggu ke-11



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

A | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

B | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (*microsite*) sebanyak 2.013
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) meningkat semula 956 menjadi 974 gerai.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif meningkat semula 1.105 menjadi 1.115.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis meningkat semula 168 menjadi 215
5. Jumlah permohonan proposal bisnis meningkat semula 509 menjadi 628.

Progres Fase III

1. Jumlah aset (pemetaan lahan) meningkat semula sebanyak 887 menjadi 905.
2. Total desa/kelurahan sebanyak 2016

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Kendala penguatan struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan adalah belum optimalnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan akibat lemahnya tata kelola dan kapasitas SDM, keterbatasan akses permodalan dan pasar, serta rendahnya tingkat digitalisasi. Pelaku usaha desa masih bergantung pada tengkulak dengan rantai distribusi yang panjang dan posisi tawar yang lemah, hal ini berdampak pada rendahnya nilai tambah produk lokal dan rentannya harga kebutuhan pokok di tingkat akar rumput.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Memperkuat peran KDKMP melalui program pendampingan terpadu yang berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen dan SDM koperasi, percepatan digitalisasi operasional dan pemasaran berbasis

platform, serta perluasan akses permodalan melalui skema pembiayaan inklusif dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Perlu dibangun ekosistem rantai pasok yang lebih pendek dengan menghubungkan koperasi langsung ke pasar untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tambah produk lokal secara berkelanjutan.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR s.d. saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan memberikan dampak positif melalui penyediaan pendidikan berasrama dan peningkatan keterampilan, namun masih terdapat tantangan dalam hal adaptasi siswa terhadap sistem pembelajaran, keterbatasan daya tampung dibanding jumlah sasaran, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan agar program tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga mampu secara konsisten meningkatkan kualitas SDM dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Perlunya peningkatan kapasitas daya tampung secara bertahap disertai pemerataan lokasi, penguatan program matrikulasi dan pendampingan psikososial untuk membantu adaptasi siswa terhadap sistem berasrama, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum berbasis keterampilan. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial untuk mendukung program magang siswa, serta penyaluran lulusan, sehingga program tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas SDM dan efektivitas dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 29 Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Banjarmasin menyampaikan kritik terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta keterbatasan akses pendidikan yang layak. Mereka menyoroti masih banyaknya bangunan sekolah di Kota Banjarmasin yang mengalami kerusakan berat, di samping adanya sekolah dengan kondisi rusak ringan hingga baik, yang menunjukkan belum meratanya kualitas infrastruktur pendidikan di daerah tersebut.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan percepatan pemerataan infrastruktur pendidikan melalui audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah sebagai dasar penetapan skala prioritas perbaikan, khususnya untuk bangunan dengan kategori rusak berat. Pemko juga harus mengoptimalkan alokasi APBD serta mendorong sinergi pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda sd saat yang sudah berjalan (unit)

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Sekolah Unggul Garuda Banua Kalimantan Selatan melakukan proses seleksi penerimaan baru tahun ajaran 2026/2027 diawali kegiatan sosialisasi pada minggu keempat Maret 2026 dan ditutup dengan daftar ulang pada 8 Juni 2026 dengan kuota peserta didik sebanyak 75 untuk peserta didik putra dan putri dengan kategori umum dan khusus (peserta didik tidak mampu dan berprestasi sebesar 10% dari total penerimaan peserta didik).

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Sekolah Unggul Garuda Banua perlu menyusun dan mempublikasikan SOP seleksi yang transparan serta mengimplementasikan sistem pendaftaran berbasis digital untuk menjamin akuntabilitas, serta Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melakukan verifikasi calon peserta didik kategori tidak mampu berbasis DTKS agar kuota afirmasi 10% tepat sasaran.

HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Pada tahun 2026, data s.d. saat ini telah teralokasi dana sebesar Rp265,05 miliar.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin terus perkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor perikanan. Dengan mengelola sebanyak 2.000 bibit ikan lele yang dikembangkan di kolam budidaya perikanan SAE 1 sebagai pembinaan kemandirian Warga Binaan.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Seluruh unit pemerintah agar menginventarisasi sesuai tugas dan fungsi serta mengambil peran seperti Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin untuk mendukung program ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan pemda terkait serta melibatkan masyarakat/mitra usaha (penyerapan hasil dan pendampingan).

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan / tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.